



**PERAN PEMERINTAH DALAM MENGEMBANGKAN PEMBERDAYAAN
KELOMPOK TANI DI DESA KIRA KECAMATAN GALELA BARAT
KABUPATEN HALMAHERA UTARA**

Oleh :

Subhan Ngolomasarani¹, Bakri La Suhu² dan Rahmat Suaib³

Corresponding author : Subhan Ngolomasarani
E-mail : subhan_galela@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pemerintah sebagai regulator dalam pemberdayaan kelompok tani, peran pemerintah sebagai dinamisor dalam pemberdayaan kelompok tani, dan mengetahui peran pemerintah sebagai fasilitator dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yakni suatu bentuk penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum sebagai macam data yang dikumpul dari lapangan secara objektif dengan tipe fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan. Analisis data menggunakan model analisa interaktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal, hal ini dilihat dari aspek pemerintah sebagai regulator (1) aturan/mekanisme, (2) kebijakan pemerintah belum sepenuhnya baik. Pemerintah sebagai dinamisor yakni (1) Sosialisasi, (2) Pendampingan, (3) Pelatihan, dan (4) kunjungan Lapangan. Dan Pemerintah sebagai fasilitator sebagai penyedia bibit unggul, pupuk, dan sarana produksi telah mampu memfasilitasi masyarakat petani cukup baik.

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Pemberdayaan, Kelompok Tani*

^{1,2,3} Prodi Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Ternate-Indonesia

PENDAHULUAN

Program pemberdayaan masyarakat yang seharusnya dilakukan pemerintah merupakan kegiatan pemerintah yang sepantasnya berjalan secara berkesinambungan serta berorientasi pada perkembangan dan kesejahteraan masyarakat yang kemudian dapat dikatakan bahwa pemberdayaan dalam hal pengembangan yang berorientasi pada masyarakat serta berlangsung secara terus menerus dan berkelanjutan demi terciptanya pola hidup masyarakat yang lebih baik, untuk melihat situasi dan kondisi yang terjadi di masyarakat, sebagaimana peran pemerintah dalam konsep Pemberdayaan maka pemberdayaan masyarakat di bagi menjadi dua komponen besar yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak atau tujuan yang harus diberdayakan dan masyarakat yang sudah berkembang dengan perbedaan kelas atau dengan nama lain kelas elit yaitu pemerintah yang menjalankan peran untuk memberdayakan masyarakat.

Peran pemerintah di harapkan baik pemerintah pusat maupun daerah diharapkan mampu memberikan peranan penting serta mampu memberi sumbangsi yang positif kepada masyarakat mengenai pemberdayaan masyarakat dengan harapan pemerintah mampu menjadi objek dalam memberikan fasilitas kepada masyarakat, mengedepankan perkembangan yang berorientasi pada kemajuan masyarakat dalam kaitannya dengan bidang pertanian. Sehingga masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah baik sebagai penyedia aturan dasar bagi masyarakat demi pengembangan petani (regulator), juga sebagai motor penggerak masyarakat dalam proses untuk pemberdayaan masyarakat (dinamisator) serta sebagai media yang mampu menciptakan segala hal yang menjadi kekurangan dan di butuhkan oleh masyarakat (fasilitator) agar tujuan untuk pengembangan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud (Labolo, 2010:36).

Menurut pengamatan penulis bahwa kenyataan yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang seharusnya terjadi mengenai peran pemerintah dalam proses pemberdayaan masyarakat, faktanya bahwa Peran pemerintah dalam pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara menuai berbagai masalah. Peranan pemerintah sebagai penyedia regulasi masih kurang massif dilihat dari peran pemerintah sebagai penyedia regulasi dalam mendukung kesejahteraan petani (regulator) masih kurang dalam memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada petani sehingga masyarakat petani kurang memahami tentang aturan yang telah di tetapkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.

Peran pemerintah sebagai (dinamisator) juga menjadi hal yang tidak sesuai dengan harapan yang terjadi di Desa Kira Kabupaten Halmahera Utara realita yang terjadi bahwa pemerintah kurang aktif terjun langsung kepada masyarakat untuk memberikan berbagai macam pemahaman dalam mensosialisasikan masalah atau solusi bagi masyarakat petani, selanjutnya pemerintah masih tidak secara aktif dalam mendampingi masyarakat petani seperti memberikan bimbingan secara langsung dalam mengelola pertanian maupun pelatihan kepada masyarakat.

Kemudian mengenai pelatihan masyarakat petani sangat membutuhkan kegiatan-kegiatan pelatihan dari pemerintah untuk mengatasi masalah yang dihadapi/ kendala yang terjadi masyarakat namun hal tersebut juga belum mampu dilaksanakan dengan baik pemerintah, serta kurangnya keterlibatan pemerintah melihat langsung kondisi yang terjadi di lapangan juga menjadi faktor utama masalah masyarakat karena pemerintah tidak mampu melaksanakan fungsi tersebut sehingga masyarakat membutuhkan kunjungan lapangan lebih terjadwal namun sebaliknya yang terjadi bahwa pemerintah sangat jarang melakukan kunjungan lapangan kemasyarakat demi perkembangan dan keberdayaan masyarakat petani itu sendiri.

Pemerintah selaku penyedia sarana dan prasana bagi masyarakat fasilitator sudah mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dalam hal pemberdayaan masyarakat pada kelompok tani di Desa Kira sebagaimana fungsi pemerintah sebagai media untuk memberikan fasilitas yang memadai bagi petani, namun dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan bahwa bantuan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat petani telah sampai masyarakat namun hal tersebut tidak diindahkan atau kurang dimanfaatkan oleh masyarakat petani karena masalah teknis penggunaan maupun pemanfaatan yang masyarakat itu sendiri kurang paham.

Faktanya bahwa dari hasil pengamatan penulis pada observasi awal sebelum penelitian menemukan bahwa pemerintah sebagai fasilitator tidak mampu menyediakan hal-hal yang di butuhkan oleh masyarakat seperti yang terjadi di Desa Kira Kecamatan Galela Barat Kabupaten Halmahera Utara, pada saat musim pengolahan lahan pertanian masyarakat sangat sulit mendapatkan pupuk bahkan ketersediaan pupuk yg disiapkan oleh pemerintah sangat langka, belum lagi bibit yang di butuhkan masyarakat masih terbatas dimana tidak seimbang antara jumlah petani yang membutuhkan bibit pupuk dan saprodi lainnya dengan yang tersedia, belum lagi alat-alat pertanian yang disediakan pemerintah dalam memberdayakan masyarakat hampir dikatakan tidak ada ataupun tidak mencukupi dari kebutuhan masyarakat.

Masalah kelompok tani juga terlihat dari kurang massifnya kerja Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) sebagai petugas untuk mengurus para petani dalam rangka mengawal dan mendamping para petani dalam hal penyuluhan, pelatihan maupun pendidikan untuk pemberdayaan masyarakat oleh penyuluh pertanian maupun pemerintah desa itu sendiri. Harapan masyarakat agar mampu meningkatkan kondisi kualitas kehidupan masyarakat di desa Kira melalui pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan

keterampilan dan proses dalam pengembangan taraf hidup petani masih jauh dari harapan kesejahteraan sesuai dengan tujuan pemerintah, dalam hal pemberdayaan.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan mengumpulkan data serta informasi dari sejumlah informan kunci yang dianggap bisa memberikan informasi yang akurat lebih mendalam.

2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah tipe penelitian fenomenologi. yaitu Tipe penelitian yang memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti berdasarkan pengalaman yang dialami informan Sugiyono (2009) .

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Pemerintah

Pemerintah secara etimologi di jelaskan oleh pamudji (2012:22-23) berasal dari kata pemerintah, sedangkan arti kata pemerintah berasal dari kata perintah.. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu Negara. Selanjutnya pengertian pemerintah adalah suatu perbuatan perilaku ataupun tindakan dalam memerintah. Bahtiar (2011:8) memaparkan bahwa peran merupakan aspek dinamis kedudukan. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya maka dapat dikatakan bahwa dia telah menjalankan suatu peranan.

Sementara itu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah bab 3 tentang kekuasaan pemerintahan bahwa: Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan sesuai dengan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,

Selanjutnya di jelaskan pada UU No. 23/2014 tentang pemerintah daerah pada pasal 7 bahwa peran pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan

terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh daerah serta pasal 7 bagian kedua menjelaskan bahwa presiden memegang tanggung jawab akhir atas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan daerah. Sehingga dari peraturan perundang undangan yang di terbitkan di atas menjadi dasar utama pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan dan sebagai penanggung jawab utama untuk memberi peran penting dalam pemberdayaan masyarakat.

B. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata "power" yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Sehingga konsep dasar dari pemberdayaan adalah berhubungan langsung dengan konsep mengenai kekuasaan (power). Sehingga kekuasaan menjadi objek yang selalu berkaitan dengan kemampuan yang di miliki untuk menggunakan kewenangan agar orang lain melakukan hal- hal yang di inginkan meskipun di balik keinginan kita mereka juga memiliki keinginan sendiri yang di kesampingkan. (Suharto, 2014:57). Terkait dengan program pemberdayaan oleh pemerintah, adanya budaya patriarki yang masih kuat di kalangan masyarakat Indonesia menjadi salah satu faktor penghambat bagi pemberdayaan (Hastuti dan Respati 2009).

Pelaksanaan program yang bersifat pemberdayaan masyarakat telah menjadi mainstreame upaya peningkatan ekonomi masyarakat nelayan dan peningkatan kesejahteraan serta pengentasan kemiskinan. Pemberdayaan berarti apa yang telah dimiliki oleh masyarakat adalah sumber daya ada dan perlu untuk di kembangkan sehingga makin nyata kegunaannya bagi masyarakat itu sendiri (Bakri, 2020).

Pasal 4 UU No. 19/2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dijelaskan bahwa Lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani meliputi:

- a. Perencanaan.
- b. Perlindungan Petani.
- c. Pemberdayaan Petani.
- d. pembiayaan dan pendanaan.
- e. pengawasan.
- f. peran serta masyarakat.

Proses pemberdayaan bagi masyarakat merupakan suatu program yang berkesinambungan, pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya (Bakri, 2019).

Suhendra (2006:74-75) mengenai pemberdayaan menyatakan bahwa pemberdayaan merupakan suatu bentuk kegiatan yang berlangsung secara berulang-ulang dan berkesinambungan, dinamis serta bersinergi dengan seluruh pihak dalam mendorong keterlibatan potensi yang ada secara evaluatif demi terlibatnya semua potensi. Sedangkan pemberdayaan masyarakat dapat dipahami dengan arti bahwa masyarakat diberi kuasa, dalam upaya untuk menyebar kekuasaan melalui pemberdayaan masyarakat dan organisasi agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya sendiri untuk aspek kehidupan yang ada seperti aspek politik, ekonomi, sosial, budaya pendidikan dan semua aspek. Suhendra mengemukakan ada beberapa unsur yang terkait dalam proses pemberdayaan masyarakat yakni sebagai berikut:

1. Kualitas politik yang memadai dan mendukung
2. Terciptanya suasana yang kondusif dalam mengembangkan potensi secara menyeluruh
3. Motivasi
4. Kualitas yang dimiliki masyarakat
5. Tersedianya peluang bagi masyarakat
6. Kerelaan mengalihkan wewenang
7. Perlindungan kepada masyarakat
8. Memiliki kesadaran

HASIL PENELITIAN

A. Peran Pemerintah Desa Kira Sebagai Fasilitator

Pemberdayaan masyarakat sangat terkait dengan ketrampilan kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan agar dapat berinteraksi dengan kelompok yang akan dihadapi baik dengan pemerintah itu sendiri. Dalam pemberdayaan masyarakat yang menjadi hal terpenting yaitu mampukah pelaku perubahan dapat memberikan fasilitas kepada masyarakat atau kelompok tani agar mau bergerak tepat dan bersinergi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara lebih utuh dan bukan hanya sekedar membangun kelompok tertentu saja. Pemerintah juga selaku pemberdaya masyarakat dapat juga melibatkan diri dalam kelompok tani tersebut untuk mencapai tujuannya.

Peran pemerintah desa sebagai fasilitator pemberdayaan pada dua kelompok tani Pomakomote dan Niamaru ialah dengan pemberian fasilitas kepada setiap kegiatan pembangunan pertanian berupa pengadaan pupuk dan bibit unggul serta pemerintah desa terus menjalin hubungan dengan Balai Penyuluhan Pertanian agar petani tidak sulit untuk mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah.

B. Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberian Informasi Kepada Kelompok Tani

Informasi sangatlah penting untuk memajukan pertanian di desa membuat pemerintah desa mengambil peran sebagai pemberi informasi kepada petani di Desa Kira. Adapun pemberian informasi secara langsung dan tidak langsung dengan berbagai cara agar lebih mudah diterima oleh petani secara menyeluruh. Pemberian informasi sesungguhnya sangat bermanfaat bagi kepentingan petani yang ada di Desa, apalagi informasi yang disampaikan sangat membantu dalam perkembangan dan kemajuan para petani dalam meningkatkan hasil pertaniannya.

Dalam pemberian informasi baik secara langsung dan tidak langsung dengan berbagai cara memang dapat memudahkan untuk lebih diterima oleh petani dan seluruh lapisan masyarakat. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah desa kira terkait dengan memberikan informasi pada petani yaitu melalui sosialisasi dan rapat bersama dengan petani.

Peran pemerintah Desa Kira dalam memberikan informasi kepada masyarakat terutama kepada petani mengenai informasi pertanian yang didapat dari dinas pertanian melalui rapat kerja pertanian yang diadakan tiga kali dalam setahun menjadikan informasi yang diberikan terfokus pada pemberdayaan petani. Informasi pertanian begitu penting sehingga pemerintah Desa Kira selalu memberikan informasi yang begitu rinci namun lebih terarah pada individu-individunya. Agar petani lebih cepat memahami informasi yang disampaikan.

Informasi yang diberikan pemerintah Desa Kira melalui ketua-ketua kelompok tani mengenai informasi yang diberikan sudah jelas dan bukan hanya satu informasi namun beragam. Informasi yang diberikan sudah cukup jelas menurut ketua dan anggota kelompok Tani Makomote dan Niamaru. Peranan pemerintah Desa Kira dalam pemberian informasi pada kelompok tani sudah cukup baik melalui tatap muka langsung dan rapat sehingga pemberdayaan kelompok tani akan semakin baik. Namun pemerintah desa juga seringkali memberikan informasi dadakan, apabila ada informasi penting yang diperoleh dari instansi terkait guna untuk menyampaikan ke Kelompok Tani Makomote dan Niamaru.

C. Peran Pemerintah Desa Sebagai Pembimbing dan Pengarah Untuk Kelompok Tani

Pemerintah berperan membimbing dan mengarahkan kelompok tani agar lebih baik. Bimbingan dan pengarahan sangat diperlukan dalam pemberdayaan kelompok tani horti curtura, pemerintah desa kira juga melakukan kerja sama dengan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) maupun dengan badan tertentu untuk memberikan

bimbingan dan pengarahan kepada kelompok tani Miamaru dan Makomote. Dalam hal ini pemerintah Desa Kira berperan sebagai Dinamisator dalam pemberdayaan kelompok tani Horti Curtura. Sehingga petani dapat mengetahui bibit unggul dan pupuk yang sesuai dengan kebutuhan tanaman yang di tanam oleh petani serta petani dapat mengetahui pemeliharaan tanaman Horti Curtura. Sosialisasi yang dilakukan pemerintah Desa Kira dilakukan tiga kali dalam setahun. Dalam hal ini yang berperan penting menjalankan kegiatan sosialisasi ialah Kepala Desa, Perangkat Desa dan Ketua Kelompok Tani.

D. Peran Pemerintah Sebagai Regulator Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani

Pemerintah sebagai regulator artinya bahwa pemerintah sebagai pelaksana dan penggerak masyarakat harus menyiapkan arah untuk menyeimbangkan penyelenggaraan pembangunan, dengan menyiapkan dan menetapkan peraturan bagi masyarakat dalam rangka peningkatan efektifitas untuk tertib dalam pengembangan dan pembangunan. Pemerintah sebagai regulator memberikan acuan dasar yang selanjutnya di pahami oleh masyarakat umum sebagai bentuk arahan untuk mengatur hal-hal yang menyangkut kegiatan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat demi terwujudnya pengembangan dan kesejahteraan masyarakat berkaitan dengan kebijakan yang mendukung pengembangan masyarakat agar lebih baik.

Aturan atau mekanisme yang diciptakan pemerintah merupakan sebuah patokan yang dibuat oleh pemerintah Desa Kira untuk memberikan batasan-batasan setiap individu atau kelompok masyarakat dalam melaksanakan aktifitasnya, sehingga aturan yang diciptakan pemerintah Desa Kira baik berupa kebijakan ataupun aturan lainnya di ciptakan dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum dan lebih husus kelompok tani.

KESIMPULAN

Peran pemerintah Desa Kira Kecamatan Galela Barat dalam pemberdayaan kelompok tani memiliki peranan yang cukup baik dalam peningkatan pertanian yaitu sebagai pemberian informasi pada kelompok tani, memotifasi dan bimbingan terhadap kelompok tani. peran pemerintah Desa Kira dalam pemberdayaan kelompok tani, pemerintah melakukan pelatihan pembuatan pupuk kompos dan melakukan pelatihan alat pertanian moderen seperti hend trector dengan bantuan Balai Penyuluhan Pertanian. Namun dalam pelaksanaan pemberdayaan kelompok tani akan ada faktor penghambat dan pendukung dalam pemberdayaan.

Faktor Pendukung pemberdayaan kelompok Tani di Desa Kira yakni :

- a. Lingkungan yang baik tidak ada batasan dan jarak antara kepala desa dengan kelompok tani dalam berkomunikasi menyampaikan masalah yang di alami petani.
- b. Kepemimpinan kepala desa yang baik dalam mengajak petani ikut pelatihan dan sosialisasi pertanian.

Sedangkan Faktor penghambat pemberdayaan kelompok tani di Desa Kira yakni :

- a. Rendahnya ketrampilan petani menyebabkan lambat melakukan perubahan untuk peningkatan pertanian di Desa Kira
- b. Kurangnya peralatan atau fasilitas moderen yang dibutuhkan petani dalam pengembangan pertanian yang lebih maju.

SARAN

1. Harus adanya peningkatan peran pemerintah Desa Kira dalam peningkatan ketrampilan kelompok tani agar meningkatkan taraf ekonomi petani menjadi mandiri serta dapat meningkatkan ekonomi petani.
2. Diharapkan adanya peningkatan fasilitas pertanian terhadap petani baik pupuk dan alat pertanian moderen sehingga petani dapat meningkatkan hasil pertanian secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Afni, Nur. 2014. Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan masyarakat Petani di Kecamatan Sinoa Kabupaten Bantaeng. Unismuh Makassar.
- Alfitri. 2011. Community Development (Teori dan Aplikasi). Yogyakarta: PustakaPelajar.
- Alam. Syamsul. 2012. Perencanaan Pemerintah Daerah dalam Melestarikan Kebudayaan Tanah Adat Karang puang Kecamatan Bulupoddo Kabupaten Sinjai. Unismuh Makassar.
- Bahtiar, A. M. 2011. Peranan Pemerintah Kecamatan dalam Pelaksanaan Pengembangan Partisipatif (Pembangunan Irigasi) di Kecamatan Masamba Kab. Luwu Utara. Unismuh Makassar.
- Davey, K.J, 2008, Pembiayaan Pemerintah Daerah Praktek-Praktek International dan Relevansinya Bagi Dunia Ketiga, Penerjemah Amanullah dkk, UI Press, Jakarta.
- Dyah Respati, dan Hastuti. 2009. Model Pemberdayaan. Negeri :Yogyakarta Labolo,
- LA SUHU, Bakri; WANCE, Marno. Pemberdayaan Masyarakat Petani Rumput Laut Di Kabupaten Halmahera Selatan (Studi Desa Mano Kecamatan Obi Selatan). *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)*, 2019, 4.2: 156-172.
- LA SUHU, Bakri, et al. Intervensi Swasta dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Desa Madapolo Kabupaten Halmahera Selatan. *Jurnal Ilmiah Tata Sejuta STIA Mataram*, 2019, 5.2: 347-362.
- LA SUHU, Bakri. PROGRAM PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT NELAYAN DI WILAYAH PESISIR KOTA TIDORE KEPULAUAN (Studi Di Desa Maitara Kecamatan Tidore Utara). *JURNAL GOVERNMENT OF ARCHIPELAGO-JGOA*, 2020, 1.1: 17-24.
- Muhadam. 2010. Memahami Ilmu Pemerintahan Suatu Kajian, Teori, Konsep, dan Pengembangannya. Jakarta: Rajawali Pers
- Moleong, J. L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nana Syaodih Sukmadinata. 2012. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung. PT. Remaja Rosdakarya.
- Pamudji, S. S. 2012. Administrasi Pembangunan: Konsep, Dimensi dan Strateginya. Jakarta: Bumi Aksara
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembinaan Kelembagaan Pelatihan Pertanian Swadaya
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa